

## ABSTRAK

Indonesia memiliki jumlah pengguna rokok terbesar ketiga di dunia. Rokok membawa dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, yang keduanya merupakan bagian dari kewajiban internasional Indonesia dalam bidang hak asasi manusia internasional. Sebagai bagian dari kewajiban hak asasi manusia internasional Indonesia, baik dalam bentuk perjanjian internasional seperti *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* maupun instrumen tidak mengikat yakni *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs), Pemerintah harus melindungi hak akan kesehatan dengan cara menetapkan kebijakan dan peraturan, serta melaksanakannya. Meski tidak sendirinya mengikat, UNGPs sendiri merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai ukuran kepatuhan negara terhadap kewajiban internasionalnya dalam hubungannya dengan pelaku usaha karena mengandung norma-norma yang sudah mengikat melalui hukum kebiasaan maupun perjanjian internasional. Adapun dalam UNGPs, kewajiban negara adalah untuk menyediakan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui mekanisme preventif dan represif (Pilar Pertama), serta menyediakan upaya pemulihan bagi anggota masyarakat yang hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha (Pilar Ketiga). Tulisan ini meneliti kesesuaian antara regulasi yang sudah berlaku di Indonesia untuk melindungi pengguna rokok dan pengguna rokok potensial dari tindakan produsen rokok, dengan standar kewajiban negara dalam UNGPs, baik dari segi kecukupan aturan yang membatasi produksi dan impor rokok, peredaran rokok, dan perlindungan bagi anak dan perempuan hamil; mekanisme pidana dan administratif yang diberikan oleh Pemerintah bagi pelanggar aturan dalam bidang pertembakauan; dan kemungkinan ditempuhnya mekanisme litigasi maupun non-litigasi untuk meminta pertanggungjawaban kepada produsen rokok atas kerugian yang ditimbulkan oleh pemasaran dan penjualan rokok.

**Kata kunci:** *Regulasi Rokok Indonesia; Gugatan Rokok; Hak Asasi Manusia; International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights; United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*

**ABSTRACT**

*Indonesia has the third highest number of smokers in the world. The pervasivity of cigarettes in the country has adversely impacted the right to health, which is part of Indonesia's international obligations in international human rights law. As part of Indonesia's international human rights obligations, both stemming from binding instruments such as the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, as well as those embodied in non-binding instruments such as the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), the Indonesian government must protect the right to health by implementing policies and regulations and overseeing its effective application. Although not itself binding, the UNGPs is a useful tool to measure a country's compliance to its international obligations in relation to business, as it contains norms that already possess binding nature through customary or conventional international law. In the UNGPs, states' obligations are twofold: to protect human rights through both preventive and repressive measures (the First Pillar), and to provide access to remedy for violations by businesses of human rights. This thesis examines the compatibility between the laws in force in Indonesia for the protection of current and potential cigarette users, namely those regulating the production and importation of, as well as the marketing and sales of cigarettes, and the protection of children and pregnant women; criminal and administrative sanctions for violators of regulations; and the possibility of pursuing judicial and non-judicial remedial mechanisms for losses suffered by cigarette users from the marketing and sales of cigarettes.*

**Keywords:** *Indonesian Cigarette Regulations; Cigarette Lawsuits; Human Rights; International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights; United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*